

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang diberikan kepada kementerian/lembaga. Berlandaskan dasar pemikiran tersebut, maka penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Pangkalan Kerinci tahun 2024 bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. LAKIN disusun berdasarkan capaian kinerja dan laporan penggunaan sumber daya yang telah digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci merupakan upaya untuk mencapai visi DJP yaitu: *“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”* dengan memperhatikan misi DJP, yaitu: *Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:*

1. *Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
2. *Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
3. *Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional; dan*
4. *Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.*

Salah satu tujuan misi yang diemban KPP Pratama Pangkalan Kerinci adalah mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil. Tahun 2024 target penerimaan yang didistribusikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci adalah sebesar Rp 2.456.928.857.290, target tersebut mengalami perubahan pada triwulan IV menjadi Rp. 2.304.947.792.000.

Penjabaran atas upaya untuk menjalankan misi DJP dituangkan dalam rencana strategis, yang menjadi tolak ukur dalam penyusunan kontrak kinerja. Pengukuran kinerja berdasarkan capaian atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJP.

Sasaran Strategis (SS) dan IKU yang ditetapkan untuk KPP Pratama Pangkalan Kerinci tahun 2024 terdapat pada ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024, kemudian 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Rincian sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut:

**Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
Intenal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Capaian kinerja organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci pada tahun 2024 memperoleh nilai 109,54 %. Perincian target dan realisasi capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana table berikut:

**Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
KPP Pratama Pangkalan Kerinci tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				102.10
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102.10
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.16%	100.16
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	104.76	104.76
<i>Customer Perspective</i>				102.38
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104.62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.16%	100.16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	110.72%	110.72
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.14
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.14%	100.14
<i>Internal Process Perspective</i>				116.95
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113.67
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	107.33%	107.33
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	115.93%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			118.37
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	122.89%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	115.12%	115.12
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	107.36%	120.00

7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	127.33%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	82.03%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				116.77
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113.54
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhinanean SDM	100.00	117.49	117.49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	95.67%	112.55
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.51	110.57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				109.54

Nilai Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Pangkalan Kerinci mencapai 109,54% dimana kinerja di masing-masing aspek (perspektif) secara umum sudah baik. Memperhatikan peluang pertumbuhan ekonomi dan potensi SDM yang tersedia, KPP Pratama Pangkalan Kerinci merancang strategi yang tepat untuk mencapai target penerimaan tahun 2024.

Fokus peningkatan pengawasan kepatuhan diarahkan pada WP strategis dan WP besar wilayah yang menjadi penentu penerimaan KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Perluasan basis pemajakan – intensifikasi difokuskan pada Wajib Pajak sektor dominan sedangkan perluasan basis pemajakan – ekstensifikasi difokuskan pada pelaku usaha di sentra ekonomi wilayah dan pedagang pengumpul/petani sawit.

Capaian penerimaan sebesar 100,16% yang diraih oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu merupakan apresiasi atas rasa optimisme, perencanaan, organisasi yang adaptif dan komitmen pimpinan serta seluruh pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci dalam mengemban amanah untuk mewujudkan kemandirian anggaran negara.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Pangkalan Kerinci tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran organisasi dan capaian kinerja berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam kontrak kinerja. Laporan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci diberikan tanggung jawab untuk mencapai sasaran strategis organisasi melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dituangkan dalam kontrak kinerja Kepala Kantor sebagai upaya mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2024, Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang kinerjanya diukur menggunakan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja menjabarkan pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan yang hasilnya diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU. Hubungan sebab-akibat yang menjadi penyebab tercapai atau tidak tercapainya sasaran organisasi dan rencana aksi yang telah/akan dilaksanakan oleh KPP ditambahkan untuk memperjelas pengukuran.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran kepada pimpinan organisasi atas capaian kinerja, efektifitas pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk itu kami sangat menghargai kritik dan saran yang dapat memberikan masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja selanjutnya.

Pangkalan Kerinci, 24 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci,



Ditandatangani secara elektronik
Nugroho Nurcahyono

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
A.1. Struktur Organisasi	1
A.2. Wilayah Kerja	2
A.3. Gambaran Ekonomi	2
A.4. Aspek Perpajakan	2
B. Peranan Strategis Kpp Pratama Pangkalan Kerinci	6
C. Sistematika Pelaporan	7
Bab II Perencanaan Kinerja	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
A.1. Realisasi Target Kinerja Organisasi	14
A.2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, Tahun 2023 Dan Tahun 2022	15
A.3. Perbandingan Capaian Nasional Dan Capaian Unit Pada Iku Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	19
A.4. Kegiatan Extra Effort	34
A.5. Analisis Atas Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	34
A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
A.7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja	35
B. Realisasi Anggaran	37
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Bab IV Penutup	41
A. Simpulan Umum Capaian Kinerja Organisasi	41
B. Rencana Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi	41
Lampiran	42
1. Perjanjian Kinerja 2024	42

BAB I

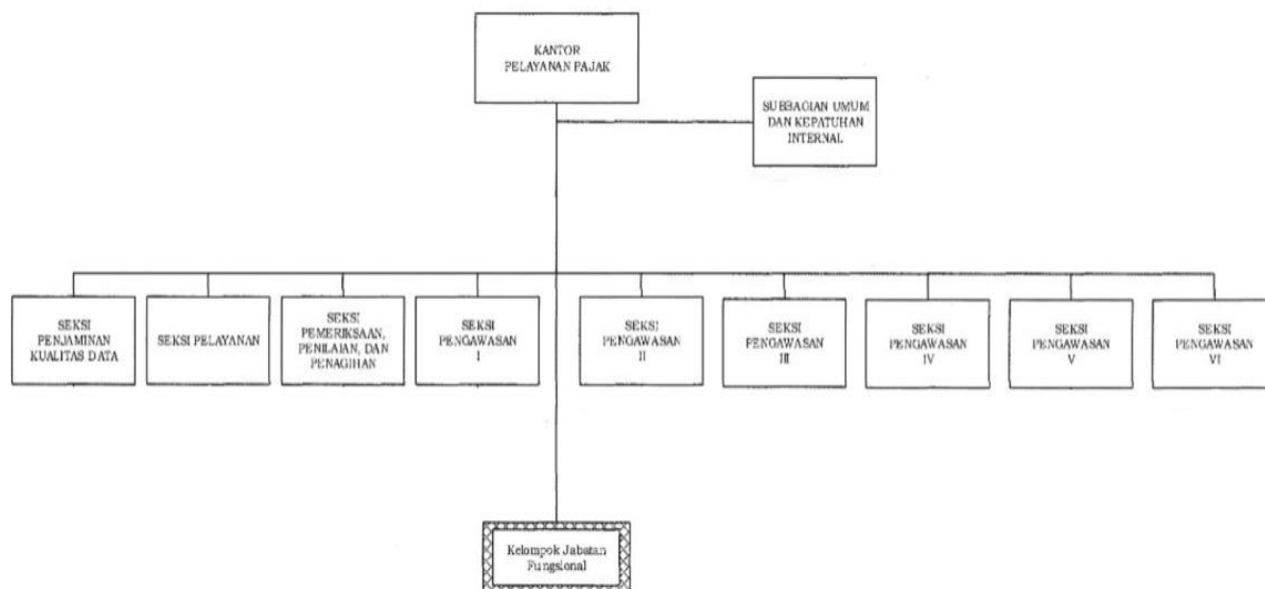
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci merupakan instansi vertikal DJP di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.01/2008 tanggal 06 Mei 2008, yang tugas dan fungsinya mengelola Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP pratama Pangkalan Kerinci dibantu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Siak Sri Indrapura dan 1 (satu) Pos Pelayanan Pajak yang berlokasi di Kabupaten Siak.

A.1. Struktur Organisasi

KPP Pratama Pangkalan Kerinci terdiri dari 1 (satu) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan 9 (Sembilan) seksi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP pratama Pangkalan Kerinci dibantu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Siak Sri Indrapura. Pada akhir tahun 2024, KPP Pratama Pangkalan Kerinci memiliki 91 pegawai yang terdiri dari 80 pegawai struktural dan 11 pegawai fungsional.



A.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci meliputi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak dengan luas wilayah 22.481,03 km² dengan struktur administrasi pemerintahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pelalawan
 - Luas Wilayah 13.924,94 km²
 - 12 Kecamatan dan 116 Kelurahan
- b. Kabupaten Siak
 - Luas Wilayah 8.556,09 km²
 - 14 Kecamatan dan 123 Kelurahan

A.3. Gambaran Ekonomi

Demografi wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci meliputi daratan berupa perbukitan, dataran rendah, dan daerah aliran sungai. Secara umum sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Pelalawan dan Siak meliputi perkebunan, perhutanan, pertanian, pertambangan, dan perikanan air tawar.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kegiatan ekonomi Kabupaten Pelalawan dan Siak merupakan kontribusi dari sektor berikut ini:

- Industri Pengolahan memberikan kontribusi 45,19%. Sektor ini ditopang oleh industri *pulp* (dan produk turunannya) dan industri pengolahan komoditas sawit. Sektor ini dapat berkembang dengan baik karena ketersediaan bahan baku utama berupa hasil hutan dan kelapa sawit.
- Pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 26,53%, sektor ini merupakan supplier bahan baku industri pengelola berupa kayu dan tandan buah segar kelapa sawit.
- Penggalian dan Pertambangan memberikan kontribusi 19,73% yang disumbang oleh eksplorasi minas di daerah Minas, Kandis, dan Pelalawan.
- Kontribusi 3,47%, perdagangan Besar dan Eceran 2,16% dan Administrasi Pemerintahan 1%.

A.4. Aspek Perpajakan

Potensi pajak di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang akibat pemanfaatan faktor-faktor produksi. Faktor produksi di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak sebagian besar berupa hutan, kebun, tambang minyak, dan perikanan air tawar. Oleh karena itu, sumber penerimaan KPP dihasilkan dari kegiatan usaha yang menjadi sektor dominan pembentuk PDRB.

Meskipun kontribusi sektor tersebut cukup besar dalam PDRB, namun rasio pajaknya hanya berkisar 1%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar merupakan Wajib Pajak cabang, sehingga hanya withholding tax saja yang pemajakannya menjadi hak KPP. Walaupun rasio pajaknya kecil namun kontribusi pembayaran Wajib Pajak tersebut terhadap penerimaan di KPP Pratama Pangkalan Kerinci cukup besar, yaitu lebih dari 60%.

Keberadaan industri pengolahan terhadap pertumbuhan sektor lain tidak terlalu signifikan, Sebagian besar industri barang dan jasa pendukung yang dibutuhkan untuk kelangsungan usaha industri pulp dan produk turunannya masih dipenuhi dari pelaku usaha yang berada di luar wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, begitu juga dengan industri pengolahan sawit dan eksplorasi minyak. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi Non Karyawan yang Sebagian besar merupakan rekanan pemerintah, rekanan kecil industri pengolahan dan migas serta pengumpul tandan buah segar.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Kerinci pada akhir tahun 2024 sejumlah 300.489. Meskipun Sebagian besar pekerjaan penduduk tersebut merupakan petani, buruh tani, buruh pabrik, dan pekerja sektor informal, namun KPP masih memiliki peluang untuk meningkatkan rasio usia produktif dan WP Orang Pribadi terdaftar.

Secara ringkas, penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dari perputaran kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
A. Pajak Penghasilan	1,117,356,759,000	1,126,575,369,223	1,126,103,991,116	1,033,055,669,016	1,032,019,005,541	8.69	8.66	100.78	107.65
1. PPh NON MIGAS	1,117,356,759,000	1,126,575,369,223	1,126,103,991,116	1,034,612,763,784	1,033,576,100,309	8.53	9.00	100.78	107.82
1.1 PPh Pasal 21	693,143,632,000	625,988,824,623	625,988,824,623	557,535,125,374	557,251,785,065	12.30	19.52	90.31	95.96
1.2 PPh Pasal 22	0	73,236,150,945	73,233,428,945	67,807,841,074	67,807,841,074	8.00	5.80	100.00	100.00
1.3 PPh Pasal 22 Impor	0	665,137,475	665,137,475	1,275,564,200	1,275,564,200	-47.75	33.57	100.00	100.00
1.4 PPh Pasal 23	0	262,701,993,554	262,701,993,554	254,580,095,080	254,580,095,080	3.36	7.68	100.00	100.00
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	4,082,629,000	3,663,964,927	3,606,477,347	2,516,844,836	2,511,395,545	43.67	121.72	88.34	103.16
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	0	26,672,291,680	26,554,050,969	17,568,829,126	17,526,261,591	21.23	82.52	100.00	100.00
1.7 PPh Pasal 26	0	9,521,862,933	9,245,679,005	6,382,515,824	5,677,209,484	62.86	-3.11	100.00	100.00
1.8 PPh Final	420,130,498,000	119,844,208,584	119,827,464,696	123,577,541,392	123,577,541,392	-2.97	-22.86	28.52	32.91
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	4,280,934,502	4,280,934,502	3,368,406,878	3,368,406,878	27.09	-9.50	100.00	100.00
2. PPh MIGAS	0	0	0	-1,557,094,768	-1,557,094,768	100.00	-	100.00	100.00
2.1 PPh Minyak Bumi	0	0	0	-1,557,094,768	-1,557,094,768	100.00	-	100.00	100.00
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	0	0	0	0	100.00	-100.00	100.00	100.00
B. PPN dan PPnBM	693,822,349,000	719,174,304,474	684,687,686,403	757,965,997,731	738,282,847,532	-6.47	19.62	98.68	99.62
1. PPN Dalam Negeri	693,822,349,000	716,365,676,563	681,891,035,492	752,731,381,497	733,048,231,298	-6.18	19.64	98.28	98.91
2. PPN Impor	0	2,583,832,671	2,571,855,671	5,147,921,176	5,147,921,176	-50.01	26.20	100.00	100.00
3. PPnBM Dalam Negeri	0	162,676,026	162,676,026	22,731,268	22,731,268	615.65	-93.81	100.00	100.00
4. PPnBM Impor	0	0	0	0	0	100.00	-100.00	100.00	100.00
5. PPN Lainnya	0	62,119,214	62,119,214	63,963,790	63,963,790	-2.88	-10.62	100.00	100.00
6. PPnBM Lainnya	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
8. PPNBM DTP	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
7. PPN DN DTP	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
C. PBB dan BPHTB	493,552,917,000	497,673,018,915	497,673,018,915	488,919,380,176	487,902,905,927	2.00	7.98	100.83	100.99
1. Pendapatan PBB	493,552,917,000	0	0	0	0	100.00	-100.00	0.00	0.00
a. PBB Perdesaan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
b. PBB Perkotaan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
c. PBB Perkebunan	493,552,917,000	90,394,674,924	90,394,674,924	85,601,316,808	85,255,929,559	6.03	-4.05	18.32	17.65
d. PBB Kehutanan	0	48,386,448,021	48,386,448,021	48,132,784,676	47,461,697,676	1.95	3.79	100.00	100.00
e. PBB Pertambangan Minerba	0	467,956,055	467,956,055	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
f. PBB Migas	0	358,423,939,915	358,423,939,915	355,185,278,692	355,185,278,692	0.91	11.95	100.00	100.00
g. PBB Pertambangan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
h. PBB lainnya	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0	1,633,514,816	1,633,514,816	100.00	-	100.00	100.00
1. PPh Pasal 21	0	0	0	1,575,494,277	1,575,494,277	100.00	-	100.00	100.00
2. PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
3. PPh pasal 22 Impor	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
4. PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
7. PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
8. PPh Final	0	0	0	58,020,539	58,020,539	100.00	-	100.00	100.00
9. PPh Non Migas lainnya DTP	0	0	0	0	0	0.00	100.00	100.00	100.00
JUMLAH D	0	0	0	1,633,514,816	1,633,514,816	100.00	-	0.00	0.00
E. Pajak Lainnya	215,767,000	228,683,000	228,683,000	496,904,396	496,904,396	-53.98	196.22	105.99	83.90
1. Bea Meterai	215,767,000	228,683,000	228,683,000	216,567,000	216,567,000	5.60	31.56	105.99	36.56
2. Penjualan Benda Meterai	0	0	0	0	0	100.00	-	100.00	100.00
3. PTLL	0	0	0	0	0	100.00	-	100.00	100.00
4. Bunga Penagihan PPh	0	0	0	280,337,396	280,337,396	100.00	-	100.00	100.00
5. Bunga Penagihan PPN	0	0	0	0	0	100.00	-	100.00	100.00

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
6. Bunga Penagihan PPnBM	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
7. Bunga Penagihan PTLL	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
8. PIB	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
9. PPN Batu Bara	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	2,304,947,792,000	2,343,651,375,612	2,308,693,379,434	2,282,071,466,135	2,260,335,178,212	2.24	11.52	100.16	103.52

B. PERANAN STRATEGIS KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI

Dalam menjalankan fungsi administrasi perpajakan, peranan Kantor Pelayanan Pajak adalah menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, melakukan pengawasan atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta melakukan koordinasi/kerja sama dengan instansi pemerintah pusat/daerah di wilayah Kabupten Pelalawan dan Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan negara.

Memperhatikan karakteristik kondisi ekonomi, Wajib Pajak dan komposisi penerimaan KPP maka strategi KPP Pratama Pangkalan Kerinci dalam menghimpun penerimaan pajak difokuskan pada Wajib Pajak yang merupakan kontributor utama penerimaan dan bergerak pada bidang ekonomi yang merupakan sektor dominan di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama pangkalan Kerinci tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan
 - A. Penjelasan Umum Organisasi
 - A.1. Struktur Organisasi
 - A.2. Wilayah kerja
 - A.3. Gambaran Ekonomi
 - A.4. Aspek Perpajakan
 - B. Peranan strategis organisasi
 - C. Sistematika pelaporan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
 - A. Perencanaan Strategis
 - B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1. Realisasi Target Kinerja Organisasi
 - A.2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, Tahun 2023 Dan Tahun 2022
 - A.3. Perbandingan Capaian Nasional Dan Capaian Unit Pada Iku Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
 - A.4. Kegiatan Extra Effort
 - A.5. Analisis Atas Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
 - A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - A.7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja
 - B. Realisasi anggaran
 - C. Efisiensi Sumber Daya Manusia
4. Bab IV Penutup
 - A. Simpulan umum capaian kinerja organisasi
 - B. Rencana untuk peningkatan kinerja organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja berisi ringkasan dari kontrak kinerja, Kepala Kantor sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak yang secara ringkas dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel Kontrak Kinerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	75%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	75%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	90%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	75%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	60%
		4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	15%
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	45%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7c-N Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	75%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	80%
		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	40%
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	100,00
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	70,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024**, amanat yang tercantum dalam Renstra DJP, prioritas nasional, dan kaitannya dengan Renja/RKA tahun 2024, dengan memperhatikan tema APBN, meliputi:

1. Amanat Renstra DJP 2020–2024

1. Visi: Mewujudkan institusi pajak yang kuat, transparan, akuntabel, serta berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional.
2. Misi:
 - Menghimpun penerimaan pajak secara optimal.
 - Memberikan pelayanan berkualitas dan profesional kepada wajib pajak.
 - Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Sasaran Strategis:
 - Meningkatkan tax ratio.
 - Mengoptimalkan penerimaan pajak.
 - Meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak.
 - Memperluas basis pajak dengan modernisasi teknologi dan digitalisasi layanan

2. Prioritas Nasional:

Renstra DJP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, terutama pada aspek penguatan ekonomi melalui:

- Reformasi perpajakan untuk meningkatkan daya saing investasi.
- Modernisasi administrasi perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dan meningkatkan efisiensi.
- Implementasi kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

3. Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/RKA) Tahun 2024

- **Tema APBN 2024:** Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Kebijakan Prioritas DJP dalam Renja/RKA:
 - Peningkatan basis pajak melalui digitalisasi layanan dan penguatan sistem informasi perpajakan.
 - Optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, termasuk pemanfaatan data pihak ketiga.

4. Implementasi dalam Renja/RKA Tahun 2024

Renja/RKA DJP 2024 mengacu pada tema **APBN 2024**, yaitu *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*. Ini mencakup:

- a) Penguatan Basis Data Pajak dan Digitalisasi Layanan:
 - Melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Core Tax Administration System (CTAS).
 - Pemanfaatan data besar (big data) dan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) untuk memperluas basis pajak.
- b) Optimalisasi Penerimaan Pajak:
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan pengawasan berbasis risiko.
 - Peningkatan kepatuhan material wajib pajak melalui integrasi data dan pengawasan berbasis teknologi.
 - Penyediaan insentif fiskal yang mendukung investasi berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan nasional.
- c) Kemudahan Pelayanan Wajib Pajak:
 - Penyempurnaan sistem e-Filing dan e-Billing untuk meningkatkan aksesibilitas layanan.
 - Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi seluler untuk pelaporan dan pembayaran pajak.
- d) Penguatan SDM dan Kelembagaan DJP:
 - Meningkatkan kompetensi pegawai DJP melalui pelatihan digitalisasi dan pengelolaan *big data*.

- Reformasi organisasi untuk mendukung fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak

5. Keterkaitan dengan Informasi Tematik APBN

APBN 2024 menekankan pentingnya perpajakan sebagai sumber pendapatan negara utama.

Kontribusi pajak tetap menjadi tulang punggung APBN dengan fokus pada:

- **Peningkatan *Tax Ratio***: Penyesuaian target penerimaan dengan pendekatan realistis berbasis pertumbuhan ekonomi.
- ***Sustainability Development Goals (SDGs)***: Kebijakan pajak diarahkan untuk mendukung pembangunan hijau, seperti pemberian insentif fiskal pada sektor energi terbarukan.
- **Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi**: Melalui penguatan insentif perpajakan bagi UMKM dan sektor strategis lainnya.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya, atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KPP Pratama Pangkalan Kerinci telah menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
Sasaran strategis ini diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama berupa persentase realisasi penerimaan pajak dan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Sasaran Strategis ini diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama berupa Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
Edukasi dan pelayanan yang efektif diukur menggunakan persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
5. Persentase pengawasan pembayaran masa
Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pengawasan Pembayaran Masa yang diukur Persentase pengawasan pembayaran masa.

6. Pengujian Kepatuhan Material yang efektif
Fungsi pengawasan KPP diukur dengan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, persentase penyelesaian pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu.
7. Penegakan Hukum yang Efektif
Efektifitas pelaksanaan diperlukan untuk mengoptimalkan pengujian kepatuhan Wajib Pajak. IKU yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, tingkat efektivitas penagihan, dan persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
8. Data dan Informasi yang berkualitas
Sasaran strategis ini diukur dengan Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, dan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Sasaran strategis ini diukur dengan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, indeks penilaian integritas unit, dan indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien diperlukan untuk membiayai kinerja organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya. Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis ini adalah indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.



C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI baru, hapus, maupun perbaikan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. Realisasi Target Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berikut ini adalah tabel indeks capaian kinerja organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				102.10
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102.10
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.16%	100.16
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	104.76	104.76
<i>Customer Perspective</i>				102.38
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104.62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.16%	100.16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	110.72%	110.72
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.14
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.14%	100.14
<i>Internal Process Perspective</i>				116.95
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113.67
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	107.33%	107.33
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	115.93%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			118.37
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	122.89%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	115.12%	115.12
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	107.36%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	127.33%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	82.03%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				116.77
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113.54
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.49	117.49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	95.67%	112.55
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.51	110.57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				109.54

A.2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		2023		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Stakeholder Perspective							
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,16%	100%	103,52%	100%	132,12%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	104,76	100	112,75	100	99,81
Customer Perspective							

Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		2023		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,16%	100%	105,38%	100%	134,92%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	110,72%	100%	102,97%	100%	106,6%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,14%	100%	59,12%	100%	76,66%
<i>Internal Process Perspective</i>							
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,8%	70%	84%	67%	80,4%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	107,33%	81	83,23	80%	87,08%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	115,93%	90%	114,29%	90%	107,24%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	122,89%	100%	120%	100%	116,3%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	100%	116,97%		
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	115,12%				
7	Penegakan hukum yang efektif						
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	111,55%	80%	110,50%	80%	98,73%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	99,82%	75%	95,10%	75%	119,4%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%				
8	Data dan informasi yang berkualitas						

Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024		2023		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	100%	120%	100%	167,93%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	82,43%	55%	72,82%		
<i>Learning & Growth Perspective</i>							
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhincangan SDM	100%	183,99%				
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	95,67%	85%	94,06%	85%	97,86%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	99,51%	90%	100%	90%	97,13%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	100	100,16	95,50	95,51
Nilai Kinerja Organisasi		109,54		104,58		109,31	

Dari data tabel di atas, kolom IKU yang berwarna hitam menggambarkan bahwa IKU dimaksud belum dan/atau tidak menjadi target IKU pada tahun tersebut, kolom IKU yang berwarna hijau menggambarkan bahwa IKU dimaksud tercapai, dan kolom IKU yang berwarna kuning atau merah menggambarkan bahwa IKU dimaksud tidak tercapai. Namun perbandingan atas IKU nilai kinerja organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci tidak dapat dijadikan acuan perbandingan penilaian secara objektif dikarenakan kondisi KPP Pratama Pangkalan Kerinci yang mengalami perubahan setiap tahun.

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra DJP

Capaian Kinerja Organisasi merupakan hasil pengukuran realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja. Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 telah melewati proses penyusunan yang cukup panjang. Dimulai pada awal tahun 2019 melalui tahapan penyusunan visi dan misi, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

Dalam proses penyusunannya, Tim Penyusun Renstra DJP melibatkan berbagai pihak dalam rangka mengumpulkan masukan dan pendapat atas strategi DJP. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah pegawai DJP baik di kantor pusat maupun di unit vertikal, anggota Komite Pengawas Perpajakan, perwakilan Wajib Pajak, dan konsultan pajak. Di samping itu, koordinasi dan sinergi juga dilakukan dengan para pengampu fungsi proses bisnis, organisasi, sumber daya

manusia, anggaran, pengelolaan kinerja, dan teknologi informasi untuk menciptakan keselarasan antara isi Renstra dengan kebijakan di masing-masing fungsi unit pengampu. Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional. Rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan nilai PDB suatu negara. Rasio ini menjadi indikator utama untuk mengukur kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Target dalam RPJMN 2020-2024:

- Pemerintah menetapkan target peningkatan rasio perpajakan untuk mendukung kebutuhan belanja negara.
- Rencana dalam RPJMN adalah meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap menjadi 11-12% pada 2024 melalui berbagai upaya reformasi perpajakan.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system)

CoreTax Administration System adalah sistem digital terpadu untuk mendukung administrasi perpajakan. Sistem ini menggantikan infrastruktur lama, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional DJP.

Target dalam RPJMN 2020-2024:

- Menyelesaikan implementasi *CoreTax* pada tahun 2024 sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.
- *CoreTax* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based compliance*) dan memperbaiki layanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi umum, aspirasi masyarakat, serta potensi dan permasalahan maka ditetapkan Visi Kementerian Keuangan yaitu: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.” Secara umum, upaya Kementerian Keuangan pada tahun 2020 – 2024 dalam mendukung Nawacita, melalui Misi Presiden nomor (2) yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing serta Misi Presiden nomor (3) yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan, adalah:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif;
- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, dan;
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Relevansi Tusi DJP terhadap RPJMN

Kedua indikator ini langsung berkaitan dengan tugas DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan pelayanan berbasis teknologi yang andal. Pelaksanaan CoreTax menjadi landasan strategis untuk mencapai target rasio perpajakan yang lebih tinggi serta mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

A.3. Perbandingan capaian nasional dan capaian unit pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Capaian unit pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Kode IKU	Sasaran Strategis/	2024	
	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,16%

Target Jangka Menengah dalam Renstra DJP 2020 – 2024

No .	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
		Target	Target	Target	Target	Target
Stakeholder Perspective						
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan dokumen Renstra DJP 2020 - 2024:

- Sasaran Strategis Penerimaan Pajak: Mencapai target penerimaan pajak secara konsisten selama periode 2020–2024.
- Indikator Kinerja Utama (IKU): Menjaga realisasi penerimaan pajak agar selalu mencapai atau melampaui 100% dari target APBN setiap tahun.
- Tren Capaian Target: Renstra DJP menargetkan penerimaan stabil pada kisaran 100% atau lebih setiap tahun hingga 2024.

Analisis Perbandingan:

- **Pencapaian:** Realisasi 100,16% menunjukkan bahwa DJP berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra.
- **Kinerja Positif:** Capaian di atas 100% mencerminkan efektivitas strategi pengawasan dan intensifikasi pajak, seperti penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*).
- **Kesesuaian dengan Target Jangka Menengah:** Hasil ini sejalan dengan visi Renstra DJP untuk menjaga penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara

Penerimaan pajak secara nasional sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 T atau 100,5% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 3,5% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh pertumbuhan dari jenis penerimaan pajak utama. Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Presentase realisasi penerimaan pajak	100%	2.456.928.857.290	100%	2.304.947.792.000	100,16%	2.308.693.379.434
		2.456.928.857.290		2.304.947.792.000		2.304.947.792.000
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100	100%	100	104,76%	104,76
		100		100		100

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak	132,12%	132,12%	103,52%	103,52%	100,16%	100,16%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	99,81%	99,81%	112,75%	112,75%	104,76%	104,76%

Pada tahun 2024 Perdagangan kelapa sawit yang menjadi penompang penerimaan KPP Pratama Pangkalan Kerinci tumbuh positif. Sektor dominan lainnya, yaitu WP Cabang industri pengolahan kayu tidak mengalami performa yang menurun dibandingkan tahun lalu. Bahkan salah satu dari WP tersebut melakukan peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi usaha sehingga *withholding taxes* WP Cabang tersebut tumbuh positif dibandingkan tahun lalu.

Performa dari belanja daerah masih stabil walaupun terjadi penumpukan penyerapan belanja daerah di bulan Desember. Selain itu PPh Pasal 21 dari Wajib Pajak Besar Lainnya (WPBL) mengalami pertumbuhan positif karena WP Cabang tersebut yang merupakan WP Besar Lainnya di KPP Pratama Pangkalan Kerinci masih stabil menjalankan kegiatan ekonominya.

Secara ringkas penerimaan KPP Pratama Pangkalan Kerinci disimpulkan sebagai berikut:

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
A. Pajak Penghasilan	1,117,356,759,000	1,126,575,369,223	1,126,103,991,116	1,033,055,669,016	1,032,019,005,541	8.69	8.66	100.78	107.65
1. PPh NON MIGAS	1,117,356,759,000	1,126,575,369,223	1,126,103,991,116	1,034,612,763,784	1,033,576,100,309	8.53	9.00	100.78	107.82
1.1 PPh Pasal 21	693,143,632,000	625,988,824,623	625,988,824,623	557,535,125,374	557,251,785,065	12.30	19.52	90.31	95.96
1.2 PPh Pasal 22	0	73,236,150,945	73,233,428,945	67,807,841,074	67,807,841,074	8.00	5.80	100.00	100.00
1.3 PPh Pasal 22 Impor	0	665,137,475	665,137,475	1,275,564,200	1,275,564,200	-47.75	33.57	100.00	100.00
1.4 PPh Pasal 23	0	262,701,993,554	262,701,993,554	254,580,095,080	254,580,095,080	3.36	7.68	100.00	100.00
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	4,082,629,000	3,663,964,927	3,606,477,347	2,516,844,836	2,511,395,545	43.67	121.72	88.34	103.16
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	0	26,672,291,680	26,554,050,969	17,568,829,126	17,526,261,591	21.23	82.52	100.00	100.00
1.7 PPh Pasal 26	0	9,521,862,933	9,245,679,005	6,382,515,824	5,677,209,484	62.86	-3.11	100.00	100.00
1.8 PPh Final	420,130,498,000	119,844,208,584	119,827,464,696	123,577,541,392	123,577,541,392	-2.97	-22.86	28.52	32.91
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	4,280,934,502	4,280,934,502	3,368,406,878	3,368,406,878	27.09	-9.50	100.00	100.00
2. PPh MIGAS	0	0	0	-1,557,094,768	-1,557,094,768	100.00	-	100.00	100.00
2.1 PPh Minyak Bumi	0	0	0	-1,557,094,768	-1,557,094,768	100.00	-	100.00	100.00
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	0	0	0	0	100.00	-	100.00	100.00

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
B. PPN dan PPnBM	693,822,349,000	719,174,304,474	684,687,686,403	757,965,997,731	738,282,847,532	-6.47	19.62	98.68	99.62
1. PPN Dalam Negeri	693,822,349,000	716,365,676,563	681,891,035,492	752,731,381,497	733,048,231,298	-6.18	19.64	98.28	98.91
2. PPN Impor	0	2,583,832,671	2,571,855,671	5,147,921,176	5,147,921,176	-50.01	26.20	100.00	100.00
3. PPnBM Dalam Negeri	0	162,676,026	162,676,026	22,731,268	22,731,268	615.65	-93.81	100.00	100.00
4. PPnBM Impor	0	0	0	0	0	100.00	-100.00	100.00	100.00
5. PPN Lainnya	0	62,119,214	62,119,214	63,963,790	63,963,790	-2.88	-10.62	100.00	100.00
6. PPnBM Lainnya	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
8. PPNBM DTP	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
7. PPN DN DTP	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
C. PBB dan BPHTB	493,552,917,000	497,673,018,915	497,673,018,915	488,919,380,176	487,902,905,927	2.00	7.98	100.83	100.99
1. Pendapatan PBB	493,552,917,000	0	0	0	0	-100.00	-100.00	0.00	0.00
a. PBB Perdesaan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
b. PBB Perkotaan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
c. PBB Perkebunan	493,552,917,000	90,394,674,924	90,394,674,924	85,601,316,808	85,255,929,559	6.03	-4.05	18.32	17.65
d. PBB Kehutanan	0	48,386,448,021	48,386,448,021	48,132,784,676	47,461,697,676	1.95	3.79	100.00	100.00
e. PBB Pertambangan Minerba	0	467,956,055	467,956,055	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
f. PBB Migas	0	358,423,939,915	358,423,939,915	355,185,278,692	355,185,278,692	0.91	11.95	100.00	100.00
g. PBB Pertambangan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
h. PBB lainnya	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0	1,633,514,816	1,633,514,816	-100.00	-79.02	100.00	100.00

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
1. PPh Pasal 21	0	0	0	1,575,494,277	1,575,494,277	- 100.00	-79.59	100.00	100.00
2. PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
3. PPh pasal 22 Impor	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
4. PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
7. PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
8. PPh Final	0	0	0	58,020,539	58,020,539	- 100.00	-15.91	100.00	100.00
9. PPh Non Migas lainnya DTP	0	0	0	0	0	0.00	100.00	100.00	100.00
JUMLAH D	0	0	0	1,633,514,816	1,633,514,816	- 100.00	-79.02	0.00	0.00
E. Pajak Lainnya	215,767,000	228,683,000	228,683,000	496,904,396	496,904,396	-53.98	196.22	105.99	83.90
1. Bea Meterai	215,767,000	228,683,000	228,683,000	216,567,000	216,567,000	5.60	31.56	105.99	36.56
2. Penjualan Benda Meterai	0	0	0	0	0	100.00	- 100.00	100.00	100.00
3. PTLL	0	0	0	0	0	100.00	- 100.00	100.00	100.00
4. Bunga Penagihan PPh	0	0	0	280,337,396	280,337,396	- 100.00	100.00	100.00	100.00
5. Bunga Penagihan PPN	0	0	0	0	0	100.00	- 100.00	100.00	100.00
6. Bunga Penagihan PPnBM	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
7. Bunga Penagihan PTLL	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
8. PIB	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
9. PPN Batu Bara	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00

URAIAN.	TARGET	Penerimaan 2024		Penerimaan 2023		Pertumbuhan		Pencapaian	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO	2024	2023	2024	2023
JUMLAH (A + B + C + D + E)	2,304,947,792,000	2,343,651,375,612	2,308,693,379,434	2,282,071,466,135	2,260,335,178,212	2.24	11.52	100.16	103.52

b. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	2.247.803.115.000	100%	2.247.803.115.000	100,16%	2.251.470.195.258
		2.247.803.115.000		2.247.803.115.000		2.247.803.115.000
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	65.695	100%	65.695	110,72%	66.128
		65.695		65.695		65.695

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	134,92%	134,92%	105,38%	105,38%	100,16%	100,16%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	106.6%	106.6%	102,97%	102,97%	110,72%	110,72%

PPH Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
---	--	--	--	--	--	--

Capaian IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 mencapai 110,72%. Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai upaya asistensi penyampaian SPT baik yang dilakukan secara daring (*zoom meeting* dan layanan *whatsapp*) dan luring (isi bareng SPT, Layanan di Luar Kantor, dan Kelas Pajak). Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa sebaran penyampaian SPT per jenis SPT masih cukup heterogeny, dimana SPT yang diterima adalah SPT 1770 S dan 1770 SS.

Di sisi lain, capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai 100,16%. Capaian ini melampaui trajectori yang ditetapkan sebesar 100%. Strategi pengawasan Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak 200 Kewilayahan (dalam bentuk IPP, Pemanfaatan bukti potong PPh Pasal 22, dan strategis pengawasan pembayaran masa yang lain) memberikan prioritas pengawasan bagi KPP sehingga berdampak positif bagi penerimaan pembayaran masa. Selain itu PPh Pasal 21 dari Wajib Pajak Besar Lainnya (WPBL) mengalami pertumbuhan positif karena WP Cabang tersebut merupakan WP Besar Lainnya yang masih stabil menjalankan kegiatan ekonominya.

c. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang tinggi

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Materail (PKM)	100%	57.144.677.000	100%	57.144.677.000	100,14%	57.223.184.176
		57.144.677.000		57.144.677.000		57.144.677.000

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Materail (PKM)	76,66%	76,66%	59,12%	59,12%	100,14%	100,14%

Penerimaan dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 sudah dapat memenuhi *trajectory* yang ditetapkan sebesar 100% ekuivalen, dengan realisasi capaian sebesar 100,14% dengan sekitar 57 Millyar, dilatarbelakangi oleh situasi dimana Wajib Pajak yang menjadi kontributor penerimaan KPP Pratama Pangkalan Kerinci, terutama di sektor Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak Cabang yang secara mendasar penerimaannya bersifat rutin. Oleh karena itu Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tersebut sangat bergantung dengan Wajib Pajak yang selama ini tidak melakukan pembayaran tetapi terdapat data Wajib pajak tersebut pada umumnya sudah sulit untuk ditemukan dan sudah tidak melakukan kegiatan usaha.

Selain itu sektor usaha yang ada di wilayah kerja KPP sangat homogen dan sedikitnya sektor usaha baru yang berdampak luas terhadap perekonomian lokal di wilayah kerja KPP. Kedua hal tersebut menyebabkan variasi terhadap kegiatan PKM menjadi terbatas. Pelaku usaha yang baru di wilayah kerja KPP masih didominasi oleh UMKM sehingga kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) di KPP tidak berdampak sebesar Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) terhadap realisasi penerimaan KPP.

d. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	%	74	74%	74	88,8%	88,8
		100		100		100
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	%	85	85%	85	107,33%	107,33
		100		100		100

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	120%	84%	120%	88,8%	120%
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	87,08%	108,85%	83,23%	102,75%	107,33%	107,33%

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah 88,8% dengan target sebesar 74%, sehingga capaian IKU adalah 120%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, terjadi kenaikan capaian IKU. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya KPP antara lain yaitu pelaksanaan kegiatan kelas pajak berbasis online dan offline, menggiatkan layanan edukasi dan penyuluhan via media social, saluran telepon dan sejenisnya, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/edukasi bersamaan kegiatan Layanan Di Luar Kantor rutin setiap bulan, dan menyediakan whatsapp center sebagai salah satu media edukasi. Walaupun demikian, kegiatan edukasi dan penyuluhan masih perlu ditingkatkan, utamanya dengan memperbanyak jumlah Wajib Pajak yang disuluh dan diedukasi sehingga dapat berdampak ke penerimaan pajak lebih signifikan.

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 mencapai 107,33%, mengalami kenaikan indeks dari tahun lalu sebesar 83,235. Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian Indeks tahun 2024 perlu di upayakan dan ditingkatkan Kembali kualitas dan kuantitas layanan kepada Wajib Pajak, antara lain dengan percepatan pembentukan satgas SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai, memberikan leaflet hak dan kewajiban perpajakan bagi WP baru yang datang ke kantor, melaksanakan LDK untuk asistensi penyampaian SPT Tahunan, pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, dan layanan lainnya, mengadakan sosialisasi penggunaan layanan elektronik melalui video, leaflet, menyediakan dan memutakhirkan informasi perpajakan di media social baik terkait layanan maupun penyuluhan/edukasi perpajakan, serta mengembangkan dan meningkatkan layanan whatsapp center untuk konsultasi dan layanan perpajakan baik di KPP maupun KP2KP Siak Sri Indrapura, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah mengakses layanan dan konsultasi perpajakan.

e. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90	100%	90	115,93%	115,93
		100		100		100

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2021, 2022, 2023						
Sasaran Strategis : Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	107,24%	119,16%	114,29%	120%	115,93%	120%

Penghitungan persentase Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) komponen yaitu jumlah STP yang diterbitkan, Jumlah WP yang dilakukan dinamisasi

pembayaran PPh 25, penambahan Wajib Pajak Baru dan Jumlah Data Matching ditindaklanjuti. Telah dilakukan penelitian dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 baik WP strategis di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Kegiatan ekstensifikasi berupa penambahan Wajib Pajak baru telah dilaksanakan dengan baik. Penerbitan STP dapat dilakukan dengan baik dan sudah melebihi target yang ditetapkan. Dan terkait data pemicu tahun 2024 telah ditindaklanjuti.

f. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100	100%	100	122,89%	122,89
		100		100		100
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100	100%	100	120%	120
		100		100		100
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100	100%	100	115,12%	115,12
		100		100		100

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	116,3%	116,3%	120%	120%	122,89%	120%
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	116,97%	116,97%	120%	120%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	115,12%	115,12%

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) mencapai 120%. Hal ini didukung karena adanya komunikasi secara intensif ke Wajib Pajak melalui komunikasi telepon dan kegiatan visit ke lokasi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat diingatkan atas kewajibannya secara terus menerus. Selain itu Wajib Pajak dibantu juga dalam proses

pembayaran kewajibannya oleh *Account Representative* (AR). Pendekatan-pendekatan seperti ini sangat efektif terhadap WP Kewilayahan atau WP UMKM.

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai 120%. IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching sebelum tahun berjalan. Tindak lanjut pemanfaatan data STP dilakukan dengan baik dan sudah melebihi target yang ditetapkan. Tindak lanjut pemanfaatan data matching dilakukan sejalan dengan usulan DPP setiap triwulan. Selain itu usaha lainnya dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak dan menghimbau agar Wajib Pajak melakukan pembetulan secara mandiri.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai 115,12%. IKU ini tidak ada pada 2 tahun sebelumnya. Tindak lanjut efektivitas pengelolaan komite sudah dilakukan dengan baik dengan melebihi target yang sudah ditetapkan.

g. Penegakan Hukum yang Efektif

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Penegakan Hukum yang Efektif						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adendddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100	100%	100	111,55%	111,55
		100		100		100
Tingkat efektivitas Penagihan	100%	75	100%	75	99,82%	99,82
		100		100		100
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	1	100%	1	100%	1
		1		1		1

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Penegakan Hukum yang Efektif						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	98,73%	120%	100,50%	120%	111,55%	120%
Tingkat efektivitas Penagihan	119,4%	120%	95,10%	120%	99,82%	120%
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%	100%

Sesuai data portal Pegasus Direktorat Penagihan dan Pemeriksaan, realisasi efektifitas penagihan di angka 99,82% dengan capaian mencapai 120%. Capaian efektifitas penagihan terdiri dari Tindakan penagihan, tindak lanjut DSPC dan pencairan DSPC. Untuk Tindakan penagihan di tahun 2024 capaiannya sudah maksimal di angka 120%. Tindak lanjut DSPC realisasi di angka 100%. Capaian pencairan DSPC yang masih rendah dipengaruhi oleh penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Pangkalan Kerinci yang saat ini sudah bangkrut dan Penanggung Pajak sulit ditemukan. Disamping itu ada beberapa penganggu pajak yang kesulitan likuiditas sehingga tidak mempunyai kemampuan bayar. Untuk Rencana aksi Tindakan penagihan tahun 2025 dengan Menyusun DSPC yang terhadap Wajib pajak yang mempunyai tunggakan lancar dan mempunyai kemampuan bayar. KPP melakukan penyusunan prioritas WP yang memiliki tunggakan terbesar dan potensi pencairan yang tinggi, juga melakukan Tindakan persuasi kepada WP untuk mengangsur pembayaran utang pajak.

Untuk IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah mencapai realisasi IKU sebesar 100,05% atau capaian IKU sebesar 111,55%. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah monitoring tunggakan pemeriksaan berdasarkan prioritas penyelesaian dan monitoring penyelesaian pemeriksaan WP Badan dan Orang Pribadi, serta pengawasan usulan DSP3 dan DSPP secara bertahap.

Untuk IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai realisasi sebesar 100%, dengan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai target yang ditetapkan untuk IKU Efektivitas Pemeriksaan adalah peningkatan kualitas usulan DSPP melalui SE-07/PJ/2020 maupun SE-15/PJ/2018, Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, Melanjutkan pengawasan penyelesaian pemeriksaan SPT LB WP Badan dan Orang Pribadi, Melakukan pendekatan persuasif kepada WP untuk menyetujui dan membayar atas nilai SKP yang diterbitkan.

h. Data dan Informasi yang Berkualitas

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Data dan Informasi yang berkualitas						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adendddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100	100%	100	127,33%	127,33
		100		100		100
Persentase perhimpunan data regional dari ILAP	55%	55	100%	55	82,43%	82,43
		100		100		100

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Data dan Informasi yang berkualitas						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengamatan	167,93%	120%	120%	120%	127,33%	120%

dan penyediaan data potensi perpajakan						
Persentase perhimpunan data regional dari ILAP	-	-	72,82%	120%	82,43%	120%

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Tahun 2024 kegiatan laporan pengamatan telah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan upaya dalam rangka memperluas basis pemajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selama tahun 2024 kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak penentu penerimaan dan sektor dominan KPP dengan memanfaatkan data bukti pemotongan dan data pihak ketiga (data ekonomi pelaku usaha dari pemerintah daerah).
2. Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan serta tim percepatan tindak lanjut penyelesaian SP2DK, SKP tahun berjalan, dan tunggakan pajak.
3. Pengawasan atas pedagang pengumpul TBS yang telah melakukan penyerahan di atas 4,8milyar dengan memanfaatkan data bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan surat ijin usaha peron.

Mapping dan Profiling penunggak pajak dalam rangka pelaksanaan penagihan aktif.

i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	100	100,00	100	183,99	183,99
		100		100		100
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	85	85%	85	95,67%	95,67
		100		100		100
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	90	90,00	90	99,51	99,51
		100		100		100

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	183,99	117,49
Indeks Penilaian Integritas Unit	97,86%	115,13%	94,06%	110,66%	95,67%	112,55%
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100%	111,11%	100%	111,11%	99,51	110,57

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 telah melampaui target, dengan angka realisasi sebesar 183,99%, begitu juga dengan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 yang melampaui target sebesar 95,67% dan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 99,51%. Indeks penilaian integritas unit merupakan tolak ukur menilai tingkat integritas sebagai upaya mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) pada empat proses bisnis pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan.

DKO merupakan media komunikasi internal yang digunakan untuk membahas isu-isu strategis organisasi dan merencanakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Selama Tahun 2024, DKO masih menjadi *tools* bagi KPP untuk melakukan koordinasi untuk mencapai target dan sasaran organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Selain Dialog Kinerja Organisasi, KPP Pratama Pangkalan Kerinci juga memanfaatkan rencana Mitigasi Risiko sebagai alat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi di KPP yang menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Rencana-rencana aksi yang dituangkan dalam Manajemen Risiko telah diupayakan semaksimal mungkin dan dilakukan dalam rentang waktu triwulan I sd IV, serta dilakukan pemantauan secara berkala dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

j. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2024						
Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
Nama IKU	Target Awal Tahun		Target Adenddum		Realisasi	
	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100	100%	100	120%	120
		100		100		100

Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2022, 2023, 2024						
Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
Nama IKU	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	100%	100,16%	100,16%	120%	120%

Penyusunan rencana pengeluaran, pemantauan penyerapan anggaran, dan revisi DIPA dalam penggunaan anggaran sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja anggaran serta membutuhkan akurasi keterpatan waktu dan biaya atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Pangkalan Kerinci telah melakukan penyusunan rencana pengeluaran, memantau penyerapan anggaran secara berkala dan mengupayakan efisiensi pelaksanaan anggaran sehingga tercapai kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal di 2024 yaitu mencapai target yg ditetapkan sebesar 120%.

A.4. Kegiatan Extra Effort

Extra Effort merupakan upaya KPP untuk memperluas basis pemajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selama tahun 2024 kegiatan Extra Effort yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan pemberi kerja/intansi untuk menegur karyawan yang belum lapor dan bayar, dan meminta pemberi kerja untuk memberikan data tambahan yaitu nomor handphone karyawannya yang aktif untuk dilakukan *WA blast*, serta disampaikannya daftar WP Penentu penerimaan untuk menghimbau pemberi kerja apabila masih terdapat karyawan yang belum melaporkan SPT Tahunan;
2. Melaksanakan ekstensifikasi melalui KPDL pada sentral-sentral ekonomi untuk menjaring wajib Pajak potensial;
3. Menyiapkan rencana kerja terkait kepatuhan dan kesediaan bahan baku untuk pemeriksaan yang berkualitas. KPP Pratama Pangkalan Kerinci berkolaborasi dengan Kanwil DJP Riau untuk wajib Pajak yang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan yang tinggi;
4. Menyandingkan data NPWP wajib Pajak KPP Pratama Pangkalan Kerinci dengan data-data yang didapatkan dari Pemerintah Daerah setempat seperti IMB, STDB, data PBB P2, data DPMPSTSP, dengan tujuan data yang disandingkan tersebut akan dijadikan data pendukung penerimaan pajak;
5. Pengujian pemenuhan kewajiban pajak WP penentu penerimaan dan sektor dominan KPP dengan memanfaatkan data bukti pemotongan dan data pihak ketiga (data ekonomi pelaku usaha dari pemerintah daerah);
6. Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan serta tim percepatan tindak lanjut penyelesaian SP2DK, SKP tahun berjalan, dan tunggakan pajak.
7. Pengawasan atas pedagang pengumpul TBS yang telah melakukan penyerahan di atas 4,8milyar dengan memanfaatkan data bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan surat izin usaha peron;
8. Mapping dan Profiling penunggak pajak dalam rangka pelaksanaan penagihan aktif.

A.5. Analisis atas Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan atau penurunan kinerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci, diantaranya adalah:

- a. Fluktuasi harga internasional *Crude Palm Oil* (CPO) yang berdampak pada naik-turun harga TBS yang menjadi penompang utama penerimaan KPP.
- b. Dinamisnya harga TBS dapat menyebabkan perang harga antara pemegang *Delivery Order* (DO) sehingga munculnya resiko bergesernya penerimaan ke KPP lain
- c. Terdapat WP Pedagang TBS yang menerapkan DPP Nilai Lain
- d. Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 112/2022 Wajib Pajak Cabang akan segera menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), dan akan melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak KPP yang sebagian besar ditopang dari Wajib Pajak Cabang.

Berdasarkan faktor tersebut, program inti KPP diprioritaskan pada beberapa aspek untuk menjadi solusi penanganan kegagalan atau penurunan kinerja, diantaranya:

1. Peningkatan produktivitas SDM
 - IHT penggalan potensi perpajakan
 - IHT *Communication Skill* untuk meningkatkan efektivitas pencairan potensi perpajakan.
 - IHT Penggalan Potensi
2. Perluasan basis pajak
 - Pengumpulan data internal dan eksternal
 - ILAP
 - Data Pemerintah Daerah: PBB P2, SITU/SIUP, IMB dan pajak wallet, pajak hotel dan hiburan
 - Kegiatan pengumpulan data lapangan/*canvassing*
 - Kegiatan pengumpulan data dari internet
 - Optimalisasi pemanfaatan data untuk kegiatan pengawasan dan ekstensifikasi
3. Peningkatan pengawasan kepatuhan perpajakan
 - Kerja sama dengan Koperasi untuk peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran petani kelapa sawit
 - Kerja sama dengan pemberi kerja atau perusahaan meningkatkan kepatuhan WP Karyawan
 - Kerja sama dengan WP besar untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran rekanan
 - Optimalisasi pemanfaatan data DIPA

A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Pangkalan Kerinci didukung oleh 91 pegawai per 31 Desember 2024 serta didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.529.077.000 untuk penyelenggaraan perpajakan yang dipercayakan pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

Sarana dan prasarana penunjang seperti gedung kantor, perlengkapan dan sistem jaringan dan aplikasi penunjang yang baik yang ada di KPP Pratama Pangkalan Kerinci merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya penerimaan yang sangat penting demi lancarnya pelaksanaan kegiatan penerimaan. KPP Pratama Pangkalan Kerinci berusaha memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

A.7. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja

Analisa rencana aksi dan mitigasi risiko pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Risiko	Ketidaksesuaian	Rekomendasi
1.	Tidak terdapat ketidaksesuaian terhadap implementasi rencana aksi mitigasi risiko triwulan IV Tahun 2024, dikarenakan	Sesuai	Sesuai

	seluruh kejadian risiko dan pelaksanaan mitigasi risiko telah dilaksanakan.		
--	---	--	--

Tahun 2025 diperkirakan perekonomian dan harga CPO dan TBS stabil, dengan memperhatikan pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2024. Hal ini memberikan peluang bagi pertumbuhan sektor dominan KPP yang berhubungan dari hulu ke hilir komoditas sawit. Dalam melaksanakan upaya-upaya mencapai keseimbangan yang optimal antara meminimalisir potensi kerugian (risiko) dan upaya memaksimalkan kemungkinan keuntungan (opportunity) di tahun 2025, KPP Pratama Pangkalan Kerinci telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi risiko, antara lain:

Arah	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Ke depan
1. Peningkatan pengawasan kepatuhan 2. Perluasan basis pemajakan	a. Pemberdayaan Pihak Ketiga dalam layanan perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran. b. Pembangunan kapasitas SDM yang selaras dengan karakteristik KPP. c. Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.	a. Kerja sama dengan koperasi petani sawit/plasma untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. b. IHT Wajib Pajak Hutan dan Kebun. c. IHT penggalan potensi d. Kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka bantuan pelaksanaan tugas dan pertukaran data.

Peluang dan Tantangan pada tahun 2025

Terdapat beberapa peluang yang dapat ditangkap untuk dilakukan optimalisasi di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kontribusi investasi wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci berasal dari strategi diversifikasi produk oleh *April Group*
- Dua industri sektor dominan KPP Pratama Pangkalan Kerinci, yaitu perkebunan sawit dan industri pengolahan kayu (Pulp) masih stabil dan terus berkembang sehingga peluang shortfall penerimaan rutin sangat kecil.
- Industri pengolahan kayu (Pulp) yang ada di wilayah kerja KPP, terutama Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP), akan melakukan ekspansi bisnis dengan membuat business line baru (*PaperBox*).
- Hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diharapkan membantu untuk penggalan potensi pajak wilayah

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pada tahun 2024 KPP Pratama Pangkalan Kerinci mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 8.529.077.000. dari jumlah tersebut tersebut, yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi adalah sebesar Rp. 8.163.775.000 dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 365.301.392. Secara garis besar komponen belanja dibagi menjadi tiga dengan realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	737.099.000	666.038.000	96%
2.	Belanja Barang	6.314.328.000	6.130.501.269	90%
3.	Belanja Modal	1.477.650.000	1.367.236.339	93%
Total		8.529.077.000	8.163.775.608	96%

Rincian pencapaian penyerapan anggaran untuk setiap jenis *output* DIPA adalah sebagai berikut:

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	8,519,011,000	0	7,374,051,321	792,372,487	8,166,423,808	95.86 %	352,587,192
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,615,740,000	0	1,387,085,363	197,590,022	1,584,675,385	98.08 %	31,064,615
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	740,579,000	0	629,633,068	95,481,019	725,114,087	97.91 %	15,464,913
BMA Data dan Informasi Publik	740,579,000	0	629,633,068	95,481,019	725,114,087	97.91 %	15,464,913
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	373,804,000	0	304,331,658	61,729,019	366,060,677	97.93 %	7,743,323
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	373,804,000	0	304,331,658	61,729,019	366,060,677	97.93 %	7,743,323
005.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	337,254,000	0	268,771,963	61,052,636	329,824,599	97.80 %	7,429,401
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	98,904,000	0	92,060,595	1,148,850	93,209,445	94.24 %	5,694,555
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	221,400,000	0	165,551,368	54,263,786	219,815,154	99.28 %	1,584,846
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,950,000	0	11,160,000	5,640,000	16,800,000	99.12 %	150,000
005.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	36,550,000	0	35,559,695	676,383	36,236,078	99.14 %	313,922
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,910,000	0	29,919,695	676,383	30,596,078	98.98 %	313,922
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,640,000	0	5,640,000	0	5,640,000	100.00 %	0
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	366,775,000	0	325,301,410	33,752,000	359,053,410	97.89 %	7,721,590
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	366,775,000	0	325,301,410	33,752,000	359,053,410	97.89 %	7,721,590
005.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	319,107,000	0	282,719,913	32,706,000	315,425,913	98.85 %	3,681,087
521211 Belanja Bahan	132,007,000	0	123,826,988	4,820,000	128,646,988	97.45 %	3,360,012
522151 Belanja Jasa Profesi	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181,080,000	0	155,752,925	25,006,000	180,758,925	99.82 %	321,075
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,520,000	0	2,640,000	2,880,000	5,520,000	100.00 %	0
005.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	47,668,000	0	42,581,497	1,046,000	43,627,497	91.52 %	4,040,503
521211 Belanja Bahan	38,068,000	0	32,981,497	1,046,000	34,027,497	89.39 %	4,040,503
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00 %	0
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	475,491,000	0	409,911,741	54,047,003	463,958,744	97.57 %	11,532,256
BMB Komunikasi Publik	475,491,000	0	409,911,741	54,047,003	463,958,744	97.57 %	11,532,256
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	237,075,000	0	193,442,596	34,621,000	228,063,596	96.20 %	9,011,404

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100 Tidak Ada Komponen	237,075,000	0	193,442,596	34,621,000	228,063,596	96.20 %	9,011,404
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	223,395,000	0	179,762,596	34,621,000	214,383,596	95.97 %	9,011,404
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	115,800,000	0	100,146,899	6,870,000	107,016,899	92.42 %	8,783,101
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98,235,000	0	73,255,697	24,751,000	98,006,697	99.77 %	228,303
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,360,000	0	6,360,000	3,000,000	9,360,000	100.00	0
100.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	13,680,000	0	13,680,000	0	13,680,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,680,000	0	13,680,000	0	13,680,000	100.00	0
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	238,416,000	0	216,469,145	19,426,003	235,895,148	98.94 %	2,520,852
100 Tanpa Komponen	238,416,000	0	216,469,145	19,426,003	235,895,148	98.94 %	2,520,852
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	211,416,000	0	193,549,145	15,586,003	209,135,148	98.92 %	2,280,852
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191,166,000	0	175,909,145	13,186,003	189,095,148	98.92 %	2,070,852
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,250,000	0	17,640,000	2,400,000	20,040,000	98.96 %	210,000
100.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	27,000,000	0	22,920,000	3,840,000	26,760,000	99.11 %	240,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,000,000	0	22,920,000	3,840,000	26,760,000	99.11 %	240,000
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	399,670,000	0	347,540,554	48,062,000	395,602,554	98.98 %	4,067,446
BCE Penanganan Perkara	88,196,000	0	66,539,500	19,975,000	86,514,500	98.09 %	1,681,500
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	88,196,000	0	66,539,500	19,975,000	86,514,500	98.09 %	1,681,500
100 Tidak Ada Komponen	88,196,000	0	66,539,500	19,975,000	86,514,500	98.09 %	1,681,500
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	88,196,000	0	66,539,500	19,975,000	86,514,500	98.09 %	1,681,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	41,900,000	0	26,850,000	15,000,000	41,850,000	99.88 %	50,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,196,000	0	33,809,500	3,775,000	37,584,500	98.40 %	611,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,100,000	0	5,880,000	1,200,000	7,080,000	87.41 %	1,020,000
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	311,474,000	0	281,001,054	28,087,000	309,088,054	99.23 %	2,385,946
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	110,550,000	0	104,173,044	5,575,000	109,748,044	99.27 %	801,956
100 Tidak Ada Komponen	110,550,000	0	104,173,044	5,575,000	109,748,044	99.27 %	801,956
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	110,550,000	0	104,173,044	5,575,000	109,748,044	99.27 %	801,956
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97,500,000	0	93,973,044	3,175,000	97,148,044	99.64 %	351,956

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,050,000	0	10,200,000	2,400,000	12,600,000	95.55 %	450,000
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	158,324,000	0	150,471,389	7,645,000	158,116,389	99.87 %	207,611
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	158,324,000	0	150,471,389	7,645,000	158,116,389	99.87 %	207,611
005.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	158,324,000	0	150,471,389	7,645,000	158,116,389	99.87 %	207,611
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140,444,000	0	135,711,389	4,525,000	140,236,389	99.85 %	207,611
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,880,000	0	14,760,000	3,120,000	17,880,000	100.00	0
BIG.005 Laporan Penilaian	42,600,000	0	26,356,621	14,867,000	41,223,621	96.77 %	1,376,379
100 Tidak Ada Komponen	42,600,000	0	26,356,621	14,867,000	41,223,621	96.77 %	1,376,379
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	42,600,000	0	26,356,621	14,867,000	41,223,621	96.77 %	1,376,379
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,320,000	0	24,076,621	14,867,000	38,943,621	96.59 %	1,376,379
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	6,903,271,000	0	5,986,965,958	594,782,465	6,581,748,423	95.34 %	321,522,577
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6,166,172,000	0	5,377,734,958	537,975,465	5,915,710,423	95.94 %	250,461,577
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	69,816,000	0	69,642,640	0	69,642,640	99.75 %	173,360
CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	69,816,000	0	69,642,640	0	69,642,640	99.75 %	173,360
100 Tidak ada komponen	69,816,000	0	69,642,640	0	69,642,640	99.75 %	173,360
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	50,188,000	0	50,042,640	0	50,042,640	99.71 %	145,360
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,188,000	0	50,042,640	0	50,042,640	99.71 %	145,360
100.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	19,628,000	0	19,600,000	0	19,600,000	99.86 %	28,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,628,000	0	19,600,000	0	19,600,000	99.86 %	28,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,684,807,000	0	4,054,959,409	491,525,675	4,546,485,084	97.05 %	138,321,916
EBA.001 Kerumahtanggaan	327,846,000	0	306,702,193	20,975,983	327,678,176	99.95 %	167,824
100 Tidak Ada Komponen	327,846,000	0	306,702,193	20,975,983	327,678,176	99.95 %	167,824
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	264,432,000	0	243,296,365	20,975,983	264,272,348	99.94 %	159,652
522151 Belanja Jasa Profesi	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	262,362,000	0	241,226,365	20,975,983	262,202,348	99.94 %	159,652

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	100.00	0
100.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	63,414,000	0	63,405,828	0	63,405,828	99.99 %	8,172
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,214,000	0	62,205,828	0	62,205,828	99.99 %	8,172
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,356,961,000	0	3,748,257,216	470,549,692	4,218,806,908	96.83 %	138,154,092
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,356,961,000	0	3,748,257,216	470,549,692	4,218,806,908	96.83 %	138,154,092
002.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	3,632,760,000	0	3,117,073,772	404,635,342	3,521,709,114	96.94 %	111,050,886
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,274,115,000	0	1,097,306,415	161,274,200	1,258,580,615	98.78 %	15,534,385
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,345,000	0	2,288,325	0	2,288,325	97.58 %	56,675
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	122,269,000	0	101,042,372	19,643,216	120,685,588	98.70 %	1,583,412
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,288,000	0	50,816,000	15,264,000	66,080,000	84.41 %	12,208,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	3,000,000	0	229,000	0	229,000	7.63 %	2,771,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	524,000,000	0	384,188,280	121,849,506	506,037,786	96.57 %	17,962,214
522111 Belanja Langganan Listrik	442,000,000	0	407,434,871	34,024,065	441,458,936	99.88 %	541,064
522112 Belanja Langganan Telepon	80,245,000	0	72,484,891	6,391,005	78,875,896	98.29 %	1,369,104
522113 Belanja Langganan Air	12,932,000	0	6,826,800	2,907,400	9,734,200	75.27 %	3,197,800
522141 Belanja Sewa	264,401,000	0	243,371,648	6,146,763	249,518,411	94.37 %	14,882,589
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	445,114,000	0	437,521,414	6,262,436	443,783,850	99.70 %	1,330,150
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6,400,000	0	6,055,550	0	6,055,550	94.62 %	344,450
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	335,651,000	0	273,198,206	28,872,751	302,070,957	90.00 %	33,580,043
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,000,000	0	34,310,000	2,000,000	36,310,000	86.45 %	5,690,000
002.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	724,201,000	0	631,183,444	65,914,350	697,097,794	96.26 %	27,103,206
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	298,765,000	0	257,444,831	40,733,800	298,178,631	99.80 %	586,369
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5,000,000	0	4,560,490	0	4,560,490	91.21 %	439,510
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	0	3,613,300	225,000	3,838,300	63.97 %	2,161,700
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	19,590,000	0	14,152,250	3,710,000	17,862,250	91.18 %	1,727,750

Rok. Baku adalah jumlah atau uang satuan dalam rupiah modal RIBA atau BPK. Lock atau akan hilang adalah uang modal RIBA/BPK sebagai modal RIBA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,600,000	0	23,426,992	7,716,150	31,143,142	87.48 %	4,456,858
522111 Belanja Langganan Listrik	38,400,000	0	31,016,700	3,036,000	34,052,700	88.68 %	4,347,300
522112 Belanja Langganan Telepon	18,000,000	0	14,108,751	1,438,400	15,547,151	86.37 %	2,452,849
522113 Belanja Langganan Air	4,000,000	0	565,500	45,000	610,500	15.26 %	3,389,500
522141 Belanja Sewa	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46,576,000	0	46,008,466	60,000	46,068,466	98.91 %	507,534
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74,270,000	0	61,816,164	7,570,000	69,386,164	93.42 %	4,883,836
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,000,000	0	4,470,000	1,380,000	5,850,000	73.12 %	2,150,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,411,549,000	0	1,253,132,909	46,449,790	1,299,582,699	92.07 %	111,966,301
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	128,699,000	0	122,097,097	0	122,097,097	94.87 %	6,601,903
100 Tidak Ada Komponen	128,699,000	0	122,097,097	0	122,097,097	94.87 %	6,601,903
100.0A KPP Pratama Pangkalan Kerinci	120,700,000	0	114,216,097	0	114,216,097	94.63 %	6,483,903
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	3,715,000	0	1,989,000	0	1,989,000	53.54 %	1,726,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,985,000	0	112,227,097	0	112,227,097	95.93 %	4,757,903
100.0B KP2KP Siak Sri Indrapura	7,999,000	0	7,881,000	0	7,881,000	98.52 %	118,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,999,000	0	7,881,000	0	7,881,000	98.52 %	118,000
EBB.004 Gedung/Bangunan	472,509,000	0	408,823,670	21,009,790	429,833,460	90.97 %	42,675,540
100 Tidak Ada Komponen	472,509,000	0	408,823,670	21,009,790	429,833,460	90.97 %	42,675,540
100.GA Pembangunan Gedung Kantor KP2KP Siak Sri Indrapura	282,982,000	0	236,396,418	18,209,790	254,606,208	89.97 %	28,375,792
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282,982,000	0	236,396,418	18,209,790	254,606,208	89.97 %	28,375,792
100.GL Pagar Rumah Dinas	93,755,000	0	83,380,972	0	83,380,972	88.93 %	10,374,028
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93,755,000	0	83,380,972	0	83,380,972	88.93 %	10,374,028
100.RB Renovasi Rumah Dinas	95,772,000	0	89,046,280	2,800,000	91,846,280	95.90 %	3,925,720
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	95,772,000	0	89,046,280	2,800,000	91,846,280	95.90 %	3,925,720
EBB.005 Tanah	810,341,000	0	722,212,142	25,440,000	747,652,142	92.26 %	62,688,858
100 Tidak Ada Komponen	810,341,000	0	722,212,142	25,440,000	747,652,142	92.26 %	62,688,858

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100.0B Pematangan Tanah KP2KP Siak Sri Indrapura	810,341,000	0	722,212,142	25,440,000	747,652,142	92.26 %	62,688,858
531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	810,341,000	0	722,212,142	25,440,000	747,652,142	92.26 %	62,688,858
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	737,099,000	0	609,231,000	56,807,000	666,038,000	90.36 %	71,061,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	737,099,000	0	609,231,000	56,807,000	666,038,000	90.36 %	71,061,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	737,099,000	0	609,231,000	56,807,000	666,038,000	90.36 %	71,061,000
001 Gaji dan Tunjangan	737,099,000	0	609,231,000	56,807,000	666,038,000	90.36 %	71,061,000
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	737,099,000	0	609,231,000	56,807,000	666,038,000	90.36 %	71,061,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	666,933,000	0	572,849,000	55,432,000	628,281,000	94.20 %	38,652,000
512211 Belanja Uang Lembur	70,166,000	0	36,382,000	1,375,000	37,757,000	53.81 %	32,409,000

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Pangkalan Kerinci didukung oleh 96 pegawai per 31 Desember 2024 serta didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.529.077.000 untuk penyelenggaraan perpajakan yang dipercayakan pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

Sarana dan prasarana penunjang seperti gedung kantor, perlengkapan dan sistem jaringan dan aplikasi penunjang yang baik yang ada di KPP Pratama Pangkalan Kerinci merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya penerimaan yang sangat penting demi lancarnya pelaksanaan kegiatan penerimaan. KPP Pratama Pangkalan Kerinci berusaha memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2024 disusun berdasarkan pencapaian kinerja sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang telah digunakan untuk mencapai sasaran organisasi sebagaimana ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci secara umum memiliki kinerja yang baik, hal ini tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi yang mencapai 109,54 % dan sasaran penerimaan yang optimal dapat mencapai 102,10%. KPP Pratama Pangkalan Kerinci dapat memenuhi target penerimaan dengan capaian 100,16%.

B. RENCANA UNTUK PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara ringkas diuraikan dalam tabel berikut:

Arah	Inisiatif Strategis	Kegiatan
1. Peningkatan pengawasan kepatuhan 2. Perluasan basis pemajakan	a. Pemberdayaan Pihak Ketiga dalam layanan perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran. b. Pembangunan kapasitas SDM yang selaras dengan karakteristik KPP. c. Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.	a. Kerja sama dengan koperasi petani sawit/plasma untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. b. IHT Wajib Pajak Hutan dan Kebun. c. IHT Proses Bisnis Perdagangan Sarang burung walet d. Kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka bantuan pelaksanaan tugas dan pertukaran data.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	75%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	75%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	90%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	75%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	60%
		4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	15%
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%
6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	45%
		7c-N Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	75%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	80%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	40%
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	100,00
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	70,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00